

SINERGITAS PEMBERDAYAAN KAMPUNG DISABILITAS DAN KAMPUNG WISATA UNTUK MEWUJUDKAN SIMBATAN SEBAGAI DESA WISATA

Tatik Mulyati¹, Ahadiati Rohmatiah², Anik T. Haryani³, Hendro Susilo⁴

^{1,2,3,4}Universitas Merdeka Madiun

e-mail : tatikmulyati@unmer-madiun.ac.id

ABSTRACT

Simbatan Village-Nguntonadi at Magetan Regency has natural, historical and cultural tourism, but it has not been managed optimally and needs to be organized. Simbatan also has a cultural heritage site Petilasan Dewi Sri, called Simbatan Temple. The village also has people with disabilities, with poor socio-economic conditions. They need help to improve their economy. In realizing the tourism village, Simbatan was hit by a problem that did not yet exist: master plan, food seller, souvenirs, food court and pedestrian at the ground-bottom tourist sites. Pokdarwis was formed in 2018 and Karang Taruna in 2015, but it has not been able to carry out activities that support tourism. The solution is carried out in stages, including: 1) making a master plan; 2) repair infrastructure at tourist sites; 3) empowerment of women and others. In line with these efforts, solutions for persons with disabilities are: 1) Improving the shelter workshop; 2) Facilitating the availability of materials, equipment and facilities needed; 3) Training in skills and production of goods that can be made disabled; 4) Ensuring the sustainability of businesses that have been initiated; 5) Increasing the welfare and independence of persons with disabilities. The purpose of this activity is to integrate the development of tourism potential and the empowerment of persons with disabilities in increasing skills and welfare gradually and continuously to create a tourist village. This activity was carried out by collaborating with several partners with the support by the Simbatan Village Head.

Keywords: Synergy, Empowerment, Kampung Disabilities, Tourism Village

ABSTRAK

Desa Simbatan Nguntonadi Magetan memiliki wisata alam, wisata sejarah dan budaya, namun belum dikelola secara optimal dan perlu penataan. Simbatan juga memiliki situs cagar budaya petilasan Dewi Sri disebut Candi Simbatan. Desa ini juga memiliki penyandang disabilitas, dengan kondisi sosial ekonomi miskin. Mereka membutuhkan bantuan untuk meningkatkan perekonomiannya. Dalam mewujudkan desa wisata, Simbatan terbentur masalah yakni belum ada: *master plan*, penjual makanan, oleh-oleh khas, *foodcourt* dan pedestrian di lokasi wisata beralas tanah. Pokdarwis terbentuk tahun 2018 dan Karang Taruna tahun 2015, tetapi belum mampu melakukan kegiatan yang mendukung pariwisata. Solusi dilakukan secara bertahap antara lain: 1) pembuatan *master plan*; 2) memperbaiki infrastruktur di lokasi wisata ; 3) pemberdayaan kaum *perempuan* dan lainnya. Sejalan dengan upaya tersebut, solusi bagi penyandang disabilitas adalah : 1) Pembinaan *shelter workshop*; 2) Memfasilitasi ketersediaan bahan, peralatan serta sarana yang dibutuhkan; 3) Pelatihan keterampilan dan produksi barang yang mampu dibuat difabel; 4) Menjamin keberlanjutan usaha yang telah dirintis; 5) Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bagi penyandang disabilitas. Tujuan kegiatan ini adalah memadukan antara pengembangan potensi wisata dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan desa wisata. Kegiatan ini dilakukan dengan menjalin kerja sama beberapa mitra dengan dukungan Kepala Desa Simbatan.

Kata kunci: Sinergitas, Kampung Disabilitas, Desa Wisata, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menargetkan Indonesia dapat memiliki 10.000 desa wisata hingga akhir tahun 2020. Pemerintah terus mendorong potensi desa yang dapat dijadikan desa wisata yang saat ini telah mencapai 7.275 desa. Sinergitas antara pengelola desa wisata dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah

(pemda) menjadi pendorong lahirnya destinasi pariwisata di Indonesia yang berjalan dengan prinsip berkelanjutan (Sandjojo, 2019).

Membangun desa wisata tidak hanya bermodalkan pemandangan indah, namun juga terdapat kriteria alam, budaya, dan kreatif. Pengemasan dengan *story telling* yang bagus dan selaras dengan hal yang menyejahterakan alam menjadi atraksi menarik, sehingga wisatawan akan kembali berkunjung (Petriella, 2019).

Maraknya kemunculan desa wisata pada satu dasawarsa terakhir menjadi potensi besar dalam pengembangan pariwisata Indonesia. Karakteristiknya yang mampu menjaga kuat kearifan lokal, lingkungan, dan memberdayakan ekonomi warga membuat desa wisata makin layak diperhitungkan. Di level internasional, sejumlah desa wisata di Indonesia juga sudah mendapat pengakuan. Tahun 2019 empat desa wisata yakni Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul (DIY), Pentingsari, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman (DIY), Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng (Bali) dan Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli (Bali) masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan di Dunia versi *Global Green Destinations Days (GGDD)* (SINDO, 2019).

Desa Simbatan terletak di Kecamatan Nguntoronadi, berjarak 20 km sebelah timur pusat Kota Magetan, memiliki potensi wisata budaya yaitu Candi Simbatan, yang merupakan Petilasan Dewi Sri, atau sering dikenal dengan Petirtaan Dewi Sri. Desa Simbatan termasuk Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Perda Kabupaten Magetan No. 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA). Candi Simbatan menjadi salah satu icon dan kebanggaan warga, bahkan sering digunakan sebagai tempat mengadakan acara adat. Pada candi ini terdapat arca Dewi Sri yang terendam air. Jika akan diadakan acara, air harus dikuras agar arca dapat terlihat. Berbagai even kegiatan sering dilaksanakan sebagai atraksi dari destinasi wisata budaya, seperti Festival Dewi Sri yang telah dijadikan agenda rutin tahunan masyarakat setempat.

Menurut *World Tourism Organization (WTO)* (Pitana, 2009) pariwisata didefinisikan sebagai kegiatan seseorang yang bepergian ke atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungannya yang biasa dalam waktu tidak lebih dari satu tahun secara terus-menerus, untuk kesenangan, bisnis ataupun tujuan lainnya. Setiap usaha untuk mendefinisikan pariwisata dan untuk menggambarkan ruang lingkungan sepenuhnya harus mempertimbangkan berbagai kelompok yang dipengaruhi dan berpartisipasi dalam industri ini. Perspektif mereka sangat penting bagi perkembangan suatu definisi yang komprehensif. Empat perspektif pariwisata yang berbeda dapat diidentifikasi yaitu: (Goeldner & Ritchie, 2009)

1. Wisatawan yaitu orang-orang yang bertujuan mendapatkan pengalaman psikis dan fisik serta kepuasan. Sifat ini akan sangat menentukan tujuan yang dipilih untuk menikmati kegiatan.
2. Para pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa wisata. Orang melihat bisnis pariwisata sebagai kesempatan untuk membuat profit dengan menyediakan barang dan jasa yang sesuai permintaan pasar pariwisata.
3. Pemerintah daerah. Politisi melihat pariwisata sebagai faktor kekayaan dalam perekonomian yurisdiksi mereka. Perspektif mereka terkait dengan pendapatan warga mereka yang dapat diperoleh dari bisnis ini. Politisi juga mempertimbangkan penerimaan devisa dari pariwisata internasional serta penerimaan pajak yang dikumpulkan dari pengeluaran wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam kebijakan pariwisata, pengembangan, promosi, dan implementasi.
4. Masyarakat lokal yaitu masyarakat yang biasanya melihat pariwisata sebagai faktor budaya dan ketenagakerjaan. Yang penting bagi kelompok ini, misalnya adalah efek dari interaksi antara sejumlah besar pengunjung internasional dan warga. Efek ini mungkin bermanfaat finansial atau berbahaya, atau keduanya.

Kerjasama sinergis diperlukan antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata di daerah, agar dapat terwujud manajemen

kepariwisataan yang baik pada seluruh bidang pendukung, sehingga dapat memberikan dampak signifikan terhadap daya tarik wisatawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat. Peran dan kontribusi sektor swasta harus terus didorong dan difasilitasi dalam pengembangan pariwisata, karena selama ini hampir sebagian besar obyek pariwisata dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat ketergantungan manajemen obyek wisata terhadap alokasi dana APBD (Cahyo dan Nuryanti, 2018).

Dalam mengefektifkan manajemen kepariwisataan, diperlukan pemahaman yang tepat mengenai aktivitas ekonomi pasar para pemangku kepentingan lainnya, yaitu dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan keberhasilan sektor pariwisata, antara lain dengan mengalokasikan dana APBD yang proporsional untuk membiayai pembangunan infrastruktur kepariwisataan (seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi), memfasilitasi masyarakat dan pihak swasta dalam mengelola potensi wisata (seperti wisata budaya, kuliner, buatan dan wisata alam), serta promosi dan pemasaran potensi wisata yang ada di daerah. Sinergi empat pilar manajemen kepariwisataan, yakni pemerintah daerah, pihak swasta, *stake holder* dan masyarakat merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan perkembangan sektor kepariwisataan di daerah. Kelemahan peran dari salah satu pilar, akan sangat menghambat upaya pengembangan kepariwisataan.

Pratama dan Kurnia (2018) menyatakan industri pariwisata merupakan rangkuman berbagai macam bidang usaha yang secara bersama menghasilkan produk maupun jasa/pelayanan yang secara langsung maupun tidak langsung akan dibutuhkan wisatawan. Ruang lingkup industri pariwisata antara lain :

- 1) *Attractions* (daya tarik), digolongkan menjadi *site attractions* yang merupakan daya tarik fisik permanen seperti kebun binatang, keraton, dan museum dan *event attractions*. yaitu atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat diubah atau dipindah dengan mudah seperti festival, pameran, atau pertunjukan kesenian daerah;
- 2) *Facilities*, berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi yang memberi kemudahan bagi pengunjung untuk memenuhi kebutuhan selama tinggal di tempat tujuan wisata seperti (penginapan/ *homestay*), makan dan minum, *support industries* seperti toko souvenir, toko cuci pakaian, pemandu, daerah festival, dan fasilitas rekreasi (untuk kegiatan).
- 3) *Infrastructure*, jika belum ada, maka daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah. Pemenuhan atau penciptaan infrastruktur adalah suatu cara untuk menciptakan suasana yang cocok bagi perkembangan pariwisata.
- 4) *Transportations*, kemajuan dunia transportasi atau perangkutan sangat dibutuhkan karena sangat menentukan jarak dan waktu dalam suatu perjalanan pariwisata.
- 5) *Hospitality* (keramahtamahan). Wisatawan memerlukan jaminan keamanan khususnya bagi wisatawan asing, termasuk gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan dituju. Maka jaminan keamanan dan perlindungan harus disediakan dan juga keuletan serta keramahtamahan tenaga kerja wisata perlu dipertimbangkan supaya wisatawan merasa aman dan nyaman selama perjalanan wisata.

Desa Simbatan disebut juga Kampung Disabilitas karena memiliki penyandang disabilitas cukup banyak. Berdasarkan pendataan Pemerintah Desa Simbatan tahun 2019, jumlah penyandang sebanyak 42 orang, yang potensial produktif 29 orang dan didominasi oleh penyandang intelektual yang berlatar belakang kondisi sosial ekonomi miskin. Mereka membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk meningkatkan kondisi kehidupannya. Di sisi lain, program pemberdayaan dari pemerintah daerah belum mampu menjangkau seluruh penyandang disabilitas yang ada, sehingga mereka semakin kesulitan untuk mengakses berbagai program pemerintah dan peningkatan sumberdaya. Dengan bantuan pelatihan dan pendampingan mereka akan mampu menjadi insan mandiri dan dapat berkontribusi dalam bermasyarakat.

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, selanjutnya disebut CPRD yang diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2011. Ratifikasi CPRD menunjukkan adanya komitmen Pemerintah untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Salah satu upaya pemberdayaan pada penyandang disabilitas adalah dengan menyelenggarakan pendidikan keterampilan sebagai bagian dalam upaya memandirikan mereka, serta mengoptimalkan potensi dan kreativitas. Dengan demikian bisa mengangkat derajat, yang di kalangan masyarakat sering dianggap hanya menyusahkan orang lain dan dipandang sebelah mata. Padahal sejatinya mereka mempunyai kemampuan, hanya faktor komunikasi yang kurang sinergis (Shaleh, 2018).

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas adalah dengan cara peningkatan kesejahteraan yang dilakukan melalui kesamaan kesempatan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas. Salah satu upaya pemberdayaan adalah dengan menyelenggarakan pendidikan keterampilan sebagai bagian dalam upaya memandirikan mereka, serta mengoptimalkan potensi dan kreativitas. Dengan demikian bisa mengangkat derajat, yang di kalangan masyarakat sering dianggap hanya menyusahkan orang lain dan dipandang sebelah mata. Padahal sejatinya mereka mempunyai kemampuan, hanya faktor komunikasi yang kurang sinergis.

Berbagai permasalahan yang dihadapi Desa Simbatan berkaitan dengan pengembangan sebagai Kampung Disabilitas dan Desa Wisata adalah sebagai berikut: (1) Belum adanya *master plan*; (2) Belum terincinya titik objek wisata yang akan dikembangkan; (3) Belum adanya kesatuan tekad antara kabupaten dan desa serta industri pariwisata untuk menangani wisata Simbatan dan kampung disabilitas; (4) Belum terolahnya objek dan kawasan potensial pariwisata; (5) Belum tersedianya kemasan wisata dalam bentuk paket wisata yang mengaitkan objek wisata dengan kampung disabilitas di Desa Simbatan; (6) Belum maksimalnya pengembangan sistem informasi kepariwisataan maupun kampung disabilitas; (7) Belum tercapainya keterpaduan berbagai kelompok masyarakat Desa Simbatan untuk bersama-sama mengembangkan wisata dan memberdayakan kampung disabilitas; dan (8) Belum tersosialisasinya misi pengembangan pariwisata dan kampung disabilitas ke berbagai sektor, instansi, dan lembaga terkait lainnya.

METODE PELAKSANAAN

Tahapan kegiatan diawali dengan kordinasi internal Tim Program Pemberdayaan Desa Mitra (PPDM) antara Ketua dan anggota berdasarkan permasalahan yang sudah diidentifikasi dan disepakati dan dituangkan dalam program yang akan dilaksanakan melalui kegiatan PPDM. Tahapan berikutnya, mengarahkan dan kordinasi dengan mahasiswa yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selanjutnya, menyiapkan surat menyurat/ administratif perijinan kepada Bakesbangpol Kabupaten Magetan dengan tembusan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Sosial. Langkah berikutnya adalah sosialisasi rencana kegiatan kepada mitra sasaran yaitu KSM Sambung Roso, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna dan TP PKK dengan menghadirkan Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal

ini dimaksudkan agar kegiatan pengabdian masyarakat didukung oleh perangkat desa, kelompok masyarakat dan penduduk Desa Simbatan. Tim menyampaikan tujuan kegiatan PPDM: (1) Membantu memberikan solusi permasalahan masyarakat Desa Simbatan; (2) Membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan wilayah desa terutama pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilindungi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dan mengembangkan potensi desa wisata yang ada di Desa Simbatan; (3) Membantu menyukseskan terlaksananya program RPJM Desa Simbatan; (4) Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa simbatan; (5) Mempercepat pembangunan Desa Simbatan pada berbagai bidang secara bertahap dan berkelanjutan; (6) Memperkuat sinergi Universitas Merdeka Madiun dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan Desa Simbatan; dan (7) Membentuk Desa Mitra sebagai salah satu model *science-techno-park* Universitas Merdeka Madiun.

Pendekatan Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan PPDM ini akan dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut :

- a. Pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang menekankan keterlibatan masyarakat (mitra) dalam keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan;
- b. Pendekatan *Participatory Technology Development* yang memanfaatkan teknologi tepat guna berbasis IPTEKS dan kearifan budaya lokal masyarakat;
- c. Pendekatan *Community Development* yaitu pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung baik sebagai obyek maupun subyek dari keseluruhan kegiatan;
- d. Bersifat edukatif dimana semua kegiatan mencakup aspek sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang memungkinkan terjadinya alih teknologi, transfer ilmu pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat.

Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Secara teknis pelaksanaan program kegiatan PPDM meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan

Tahap persiapan mencakup inventarisasi perubahan situasi dan kondisi dan menyesuaikan antara program yang sudah direncanakan dengan kondisi eksisting sehingga desain pelaksanaan kegiatan bisa membawa manfaat secara maksimal. Pelaksanaan kegiatan pada tahap persiapan ini termasuk mencakup sosialisasi dimulainya kegiatan program PPDM.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan fisik dilaksanakan di 5 (lima) obyek pengabdian yaitu:

- a. Pembuatan Master Plan
- b. Pembuatan taman di Gapura Desa Simbatan;
- c. Penanaman tanaman hias Tabebuaya dan Plumeria di sepanjang jalan masuk dari gapura desa ke Taman Dewi Sri;
- d. Renovasi bekas lumbung desa menjadi Sheltered Workshop Peduli Disabilitas;
- e. Pavingisasi pedestrian di dalam Taman Dewi Sri dan jalan ke Beji.

PEMBAHASAN

a. Pembuatan Master Plan

Pembuatan *master plan* bertujuan untuk memudahkan pembangunan-pengembangan spot lokasi wisata Taman Dewi Sri secara bertahap dan berkesinambungan. Perencanaan dilakukan secara komprehensif bersama Kepala Desa, Pokdarwis, Karang Taruna dan TP PKK Simbatan. Pembuatan dikerjakan oleh anggota Tim PPDM dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Merdeka Madiun. Pembuatan *Master plan* didasarkan pada denah/ lay out yang telah dibuat sebelumnya, saat ini sedang dalam tahap pembuatan, karena baru dibuat pada

bulan Juli 2020 setelah ada kepastian status tanah sebagian lokasi Taman Dewi Sri; memuat tentang peta lokasi desa wisata di Simbatan yang nantinya akan memudahkan pengunjung untuk melihat letak lokasi wisata di Desa Simbatan mulai dari Taman Dewi Sri Simbatan, Petirtaan Dewi Sri, Wisata Candi Simbatan, *Sheltered Workshop* untuk kegiatan penyandang disabilitas, dan sebagainya.



Gambar 1. Rencana Pembuatan Master Plan

b. Pembuatan taman mini di Gapura Desa Simbatan

Pembuatan taman mini di sebelah kanan-kiri (barat dan timur) gapura pintu masuk Desa Simbatan dilakukan dengan tujuan agar pintu masuk gapura desa nampak indah, asri dan menarik untuk dilihat bagi siapa pun yang lewat. Pembuatan taman dimulai pada awal bulan Maret 2020 dengan maksud masih berada di musim penghujan sehingga memudahkan pemeliharaan (penyiraman).



Gambar 2. Pembuatan Taman di Bagian Barat dan Timur Gapura Desa

c. Penanaman tanaman hias Tabebuaya dan Plumeria dari Gapura Desa ke Taman Dewi Sri

Penanaman tanaman hias sebanyak 225 pohon di sepanjang kanan-kiri jalan dari gapura desa menuju lokasi wisata Taman Dewi Sri dan Candi Simbatan sepanjang 700 meter telah selesai dilaksanakan dan pemeliharaannya diserahkan kepada masyarakat setempat yang ada di sepanjang jalan tersebut. Taman mini gapura dan tanaman hias di sepanjang jalan masuk desa diharapkan dapat mempercantik gapura dan jalan masuk sehingga diharapkan pengunjung makin tertarik untuk berwisata ke Desa Simbatan.



Gambar 3. Penanaman tanaman hias Tabebuaya dan Plumeria

d. *Sheltered Workshop* Peduli SAMBUNG ROSO untuk kegiatan penyandang disabilitas

Sebagaimana diketahui, produk batik Ciprat Langitan Simbatan telah dijadikan *icon* Kecamatan Nguntoronadi kabupaten Magetan. Dalam mengembangkan usaha agar berkelanjutan serta mampu memenuhi kebutuhan pasar, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sambungroso yang menaungi para penyandang disabilitas dalam memproduksi Batik Ciprat membutuhkan tempat kegiatan yang permanen dan nyaman. Peralatan sebagai bentuk dukungan produksi juga diperlukan sebagai tambahan modal usaha. Semula *shelter* bertempat di Balai Desa, namun jika ada kegiatan desa, aktivitas penyandang disabilitas terpaksa harus diliburkan agar tidak mengganggu. Di Desa Simbatan terdapat bekas lumbung desa yang tidak terpakai dan sangat tidak layak huni. Dengan persetujuan Kepala Desa beserta perangkat, dilakukan renovasi bekas lumbung tersebut bagi kegiatan para penyandang disabilitas. Pemindahan, pembenahan dan penataan telah dilaksanakan oleh tenaga profesional (tukang bangunan) diawasi oleh Tim PPDM dan mahasiswa sebagai pembantu pengabdian. Pekerjaan dimulai dari penataan genting, pengecatan, pembuatan pintu penghubung antar ruangan, penyambungan arus listrik. Pembuatan sumur air bersih, kamar mandi dan sumur resapan menjadi tanggung jawab desa yang dibiayai dari dana desa. Pemindahan ke *sheltered workshop* baru, dilakukan oleh penyandang disabilitas di bawah koordinasi pengurus dan pendamping KSM dibantu anggota Karang Taruna dan penataan dilakukan tim PPDM bersama anggota Pokdarwis. Saat ini *shelter* untuk penyandang disabilitas tersebut sudah dapat dipakai untuk memproduksi batik dan untuk kegiatan penyandang disabilitas seperti membuat batik dan kegiatan keterampilan kreatif lainnya



.Gambar 4. Bekas Lumbung Menjadi *Sheltered Workshop* Peduli SAMBUNG ROSO

e. Pembuatan Paving Block Pedestrian Taman Dewi Sri dan Jalan ke Beji

Pembuatan *paving block* untuk pedestrian di dalam Taman Dewi Sri dilakukan karena jika musim kemarau pedestrian tersebut berdebu dan jika musim hujan becek sehingga pengunjung merasa tidak nyaman. Pengerjaan *paving block* telah selesai dilaksanakan dimana pelaksanaannya dilakukan secara bergotong royong antara Pokdarwis dan Karang Taruna di bawah pengawasan anggota Tim PPDM dibantu mahasiswa dari Fakultas Teknik Sipil sebagai pembantu pengabdian dan tenaga ahli. Dengan adanya paving block Taman Dewi Sri lebih tertata rapi, indah dan bersih sehingga pengunjung nyaman berwisata di taman tersebut.



Gambar 5. Paving Block Pedestrian Taman Dewi Sri dan Jalan ke Beji

f. Pemberian Pelatihan Keterampilan

Pemberian pelatihan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Desa Simbatan untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat setempat pada khususnya dan Desa Simbatan pada umumnya. Latihan keterampilan rencananya diberikan kepada penyandang disabilitas, Pokdarwis, Karang Taruna dan anggota TP PKK Desa Simbatan.

Pemberian pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas dengan mendatangkan instruktur, agar produk batik yang dihasilkan lebih variatif dan lebih berkualitas sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Bahan untuk praktek pelatihan ini rencananya disediakan oleh tim PPDM. Pemberian pelatihan manajemen pariwisata bagi Pokdarwis & Karang Taruna direncanakan dengan mendatangkan narasumber dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Magetan atau diikutkan dalam kegiatan *workshop* atau studi banding. Dengan pelatihan ini diharapkan Pokdarwis dan Karang Taruna mampu mengelola dan menjaga area wisata di Desa Simbatan agar lebih produktif dan potensial sehingga wisatawan tertarik untuk berkunjung ke Desa Wisata Simbatan. Pemberian pelatihan kuliner pembuatan makanan olahan bagi anggota TP PKK, hasilnya diharapkan bisa dijual di lapak atau pasar rakyat di Taman Dewi Sri. Kegiatan dilakukan setelah uji coba resep sebelum, memberikan pelatihan kepada kelompok sasaran. Setelah menyiapkan alat dan bahan, melakukan pelatihan dan dilakukan advokasi untuk pengurusan ijin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Pelatihan ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat desa untuk mendukung wisata di Desa Simbatan dengan kuliner yang nikmat dan sehat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan PPDM yang dilaksanakan di Desa Simbatan Kecamatan Ngutoronadi, Kabupaten Magetan berjalan dengan lancar tanpa halangan berkat dukungan dari masyarakat desa setempat, Pokdarwis, Karang Taruna, pemerintah desa, Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan. Kendala yang dihadapi adalah ketika bulan April 2020 Pemerintah Daerah Simbatan menetapkan *lockdown* karena adanya himbauan dari Pemerintah, sehingga kegiatan fisik berhenti. Kegiatan dilanjutkan kembali setelah ditetapkannya Era New Normal pada bulan Juni 2020.

Pelatihan keterampilan yang telah direncanakan pada tahun pertama, belum bisa dilaksanakan karena ada pengalihan program sehingga dana terserap dalam pembangunan fisik di 5 (lima) obyek yang telah disebutkan. Belum adanya lapak untuk berjualan, pedagang makanan atau minuman, souvenir khas Desa Simbatan, makanan olahan berbahan kacang tanah yang merupakan hasil pertanian yang melimpah dan makanan olahan berbahan baku tempe, akan menjadi program kegiatan pada tahun berikutnya. Termasuk penyempurnaan/finishing pagar dan gapura Taman Dewi Sri, penanaman pohon bambu mini di belakang lapak, penambahan pergola, kursi dan sarana penunjang lainnya serta pemberian bantuan alat batik, mesin jahit dan almari penyimpanan bagi penyandang disabilitas di *sheltered workshop* peduli.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, Tim PPDM Universitas Merdeka Madiun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia yang telah membiayai kegiatan ini, disertai harapan semoga program kegiatan pada 2 (dua) tahun berikutnya tetap mendapatkan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sandjojo, Eko Puto (2019). Pemerintah targetkan jumlah desa wisata capai 10 ribu pada 2020. <https://www.antaranews.com/berita/1008682/pemerintah-targetkan-jumlah-desa-wisata-capai-10-ribu-pada-2020>, 13 Agustus 2019
- [2] Petriella, Yanita. 2019. *Indonesia Ditargetkan Punya 2.000 Desa Wisata Tahun 2019*. Bisnis.com. 05 Juli 2019. Diakses pada 12 Juni 2020
- [3] SINDO (2019). Desa Wisata, Potensi Andalan Pariwisata di Indonesia. Koran SINDO Sabtu, 2 November 2019. <https://ekbis.sindonews.com/berita/1454806/34/desa-wisata-potensi-andalan-pariwisata-di-indonesia>
- [4] Pitana, I Gde & Diarta, I.K.Surya 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit Andi
- [5] Goeldner, R. Charles & Ritchie, J.R. Brent (2009). *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
- [6] Cahyo, E.D dan Nuryanti, W. (2018). Peran Sektor Pemerintah dan Swasta dalam Perkembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Pulau Morotai. *Gadjah Mada Journal of Tourism Studies*. Vol 1 no. 2, October 2018, <https://journal.ugm.ac.id/gamajts/article/download/49293/25427>
- [7] Pratama, G.Fajar & Kurnia, Ganjar (2018). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung). *Jurnal Agroinfo Galuh* vol. 5 no.1 (2018)
DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/jimag.v5i1.1572>
- [8] Shaleh, Ismail. 2018. Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20, No.1, (April, 2018), pp. 63-82.